

Rabu, 23 Februari 2011

Sekda: SKPD Koordinasi dengan BPK

Pontianak, BERKAT.

Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Drs. Muhammad Zeet Hamdy Assovie, mengungkapkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta untuk berkoordinasi dengan pemeriksa, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar.

“Lakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya, data yang diberikan pun berkooperasi. Bantu pemeriksa dengan memberikan data yang lengkap, jelaskan apabila ada pertanyaan, tindak lanjut apabila ada tindak lanjut dan Sekda akan kawal itu,” katanya di Pontianak, Selasa (22/2).

Ia mengatakan Kalbar mengacu pada hasil laporan keuangan Kalbar tahun 2010 yang naik dua tingkat dibandingkan tahun 2009, yaitu dari Disclaimer Opinion menjadi Wajar dengan Pengecualian.

“Hasilnya akan diketahui bulan ini, setelah 30 hari pemeriksaan,” tambah M. Zeet. Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH, sebelumnya, mengatakan provinsi ini memiliki tim untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang terdiri dari Pemprov Kalbar dan BPK RI perwakilan Kalbar.

“Dengan koordinatornya adalah Sekda Kalbar,” katanya. Gubernur berharap BPK bisa memanggil satu per satu SKPD

untuk menjelaskan laporan keuangannya, sehingga dalam satu bulan, masing-masing SKPD tersebut sudah bisa memberikan hasil evaluasinya.

“Dan pada 1 April 2011, sudah bisa sampai ke Menteri Dalam Negeri,” kata Cornelis. Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudiby, mengatakan akan melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 pada Minggu ke dua Maret 2011 dalam dua tahapan, dan tahap satu diharapkan akan selesai April 2011 mendatang serta tahap dua akan selesai pada Juni 2011.

“Saat ini ada tiga kabupaten yang belum memberikan informasi rencana pe-

nyelesaian Laporan Keuangan, yakni masing-masing Bengkayang, Sanggau dan Landak,” ungkap Adi Sudiby.

Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah di Kalbar untuk selalu meningkatkan capaian opini hasil pemeriksaan. Dicontohkannya, Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun lalu, dari opini disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Saya berharap, semoga opini Pemerintah Provinsi Kalbar dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ini hendaknya dapat diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar,” pungkas Adi Sudiby. (nia)